

MEMBANGUN IDENTITAS INDONESIA DI TENGAH PERUBAHAN INTERNASIONAL PASCA COVID 19: ANTARA ISLAM DAN DEMOKRASI

Siti Mutiah Setiawati

Jurusan Hubungan Internasional – Universitas Gadjah Mada

smutih@ugm.ac.id

Abstrak

Perubahan Tata Kelola Internasional terjadi secara signifikan dengan munculnya COVID-19. Politik internasional yang biasanya diwarnai oleh konflik dan kerjasama tiba-tiba hilang dan negara negara menjadi lebih individualitis. Akibatnya tidak muncul tokoh-tokoh internasional yang memikirkan solusi pasca pandemi seperti Rosevelt, Churchil, dan Stalin. Disamping itu, dari sisi negara sedang berkembang seperti Indonesia tantangan untuk membangun identitas bangsa dan negara semakin berat mengingat masalah kesehatan ini berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial dan politik. sehingga diperlukan penyesuaian. Indonesia sudah lama dikenal sebagai negara yang mempunyai penduduk Islam terbesar di dunia karena 85 % dari 270 juta beragama Islam. Sedangkan sebagai negara demokratis nomor tiga terbesar setelah Amerika Serikat dan India baru dikenal setelah tahun 1998. Dua identitas ini sangat mempengaruhi hubungan internasional Indonesia dengan negara-negara, dan komunitas internasional. Metode kualitatif digunakan untuk mencari jawaban seperti apa tata hubungan internasional pasca pandemi COVID-19, mengapa belum muncul tokoh inernasional yang mempunyai ide mengenai tata kelola internasional yang baru, dan bagaimana Indonesia menggunakan identitasnya untuk menyesuaikan dengan perubahan politik internasional pasca COVID-19. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode konstruktivisme yang mengamati obyek penelitian dari sudut pandang “identitas “. Dari proses analisa didapatkan jawaban bahwa tokoh internasional tidak muncul karena sebagian besar negara hanya memikirkan solusi individu negara dalam menanggapi masalah pandemi global. Perilaku hubungan antar negara tidak lagi diwarnai oleh konflik dan kerjasama karena intensitas pertemuan antar kepala negeri menurun drastis karena adanya himbauan “social and physical distancing.” Indonesia memilih pragmatis dalam menyesuaikan dengan perkembangan internasional dengan meninggalkan dua identitasnya memilih menggunakan hampir 100 % vaksin Sinovac dari China.

Kata Kunci: Pandemi, COVID-19, Tata Kelola, Identitas.

A. Pendahuluan

Sejak akhir tahun 2019, dunia seolah berhenti berputar ketika terjadi wabah COVID-19 yang juga dikenal sebagai Virus Corona. Menurut Prof. Zaely Nurachman, Guru Besar Biokimia FMIPA ITB (Kompas 4 Juni 2020) SARS-Cov 2 adalah virus penyebab COVID-

19 (Corona) merupakan makhluk yang sangat lemah yang bisa mati hanya dicelupkan ke dalam sabun, RNA sebagai inti dari virus ini hancur berkeping keping. Akan tetapi meskipun lemah makhluk ini sangat cerdas jika sudah hidup di tempat yang cocok akan sangat sulit dihancurkan. Untuk membunuh manusia virus ini hanya dengan menghambat saluran pernapasan dengan gelembung lendir yang mudah ditularkan kepada manusia yang lain. Oleh karena keadaan antibody manusia berbeda beda maka penyebaran virus ini sangat cepat jika manusia kontak dengan yang lain.

Fenomena virus sebagai masalah Kesehatan terus berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik termasuk politik internasional. Dalam hubungan antar negara atau hubungan internasional Virus Corona telah merubah tatanan dunia pola hubungan internasional. Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia diwarnai dengan persaingan antara dua *Super Power* yang membagi dunia secara vertikal antara Blok Barat yang berideologi Kapitalisme dengan Blok Timur yang berideologi Sosialisme/Komunisme. Pola hubungan internasional diwarnai dengan persaingan dua Blok ini yang masing masing diwakili oleh Amerika Serikat bersama sekutu-sekutunya dan Uni Soviet/China bersama sekutunya. Dunia diwarnai persaingan dua ideologi yang kemudian membentuk bipolar yang secara teori sangat rentan terjadinya konflik sehingga negara-negara sulit mewujudkan perdamaian internasional.

Hubungan antar negara di masa pandemi COVID-19 ditandai upaya negara-negara untuk mengatasi bencana penyakit yang mematikan ini. Negara *Super power* seperti Amerika Serikat tidak berarti menjadi negara yang termasuk bagus dalam menangani COVID-19 sebaliknya merupakan negara yang termasuk tidak tanggap dalam mengelola pandemi COVID-19. (Poppy, 2021: hal 35). Sedangkan Indonesia termasuk negara yang menengah dalam mengelola pandemi yang ditunjukkan dengan keputusan untuk mendatangkan vaksin Sinovac dari China dengan jumlah kurang lebih sama dengan jumlah penduduk. Keputusan ini tidak mempertimbangkan prinsip politik luar negeri bebas aktif, identitas Islam yang mempunyai solidaritas dengan negara-negara Islam maupun identitas sebagai negara yang demokratis karena tidak ada wacana negara sebelumnya. Selama pandemi tidak muncul tokoh internasional yang menjadi pemimpin untuk mengelola pandemi ini secara global. Negara-negara cenderung mengatasi secara individual dan bekerjasama dengan negara yang sama ideologinya mirip pada masa perang dingin.

Masalah identitas telah menjadi fenomena yang menarik sejak pasca Perang Dunia II yang kemudian menghasilkan pola hubungan internasional yang diwarnai dengan adanya Blok Barat, Blok Timur, NonBlok, Negara Maju, Negara Berkembang, Negara Dunia I ,

Dunia II, Komunis, Kapitalis, Demokratis, Otoriter, dan lain lain. Dalam perkembangan selanjutnya identitas agama menjadi fenomena khusus yang muncul karena adanya konflik-konflik baik antar negara maupun di dalam negara yang disebabkan oleh agama misalnya konflik Irlandia Utara yang Katolik dengan pemerintah Inggris yang Kristen Anglikan, Konflik Lebanon antara kelompok Kristen dengan Muslim, Perang Irak-Iran antara Muslim Sunni dengan Syiah, Konflik Hindu-Muslim di Sri Langka dan India, dan lain. Identitas agama menjadi obyek studi ilmu hubungan internasional meskipun seringkali dihindari mengkategorisasikan sebuah konflik sebagai konflik agama karena dianggap masalah sensitif dan bisa menimbulkan konflik baru karena munculnya solidaritas.

Sementara itu, menyangkut pengelolaan menuju negara yang “good governance” setelah munculnya negara-negara yang baru saja merdeka pasca PD II, pilihan untuk menjadi negara yang demokratis dianggap pilihan yang paling sesuai karena akan menjamin kebebasan individu dan adanya kontrol terhadap penguasa. Tetapi tidak semua negara memilih cara yang demokratis dalam mengelola negara ada yang semi demokratis, dan ada yang diktator atau semi diktator.

Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945-1949, Indonesia sudah dikenal sebagai negara Islam terbesar di dunia mengingat semula 95 % penduduk Indonesia beragama Islam, dan sekarang 85% dari 270 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Dapat dikatakan tidak ada satu negarapun yang memiliki jumlah penduduk Islam sebesar Indonesia meskipun negara tersebut dari Timur Tengah. Iran misalnya jumlah penduduknya hanya 82,91 juta, 90 % diantaranya Muslim, Mesir 80% dari 100 juta, dan Turki 80 % dari 79,81 juta. Dengan jumlah penduduk Islam sebesar ini, Islam menjadi identitas negara yang akan mempengaruhi politik dalam dan luar negeri.

Sedangkan untuk masalah demokrasi, Indonesia baru dikenal sebagai negara demokratis terbesar nomor tiga di dunia setelah reformasi di tahun 1998. Sebelumnya dikenal sebagai negara Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, dan Demokrasi Pancasila yang ketiganya berkonotasi semi demokratis. Banyak ahli memprediksi bahwa Islam tidak pernah bisa berdampingan dengan demokrasi karena prinsip-prinsip Islam dianggap tidak menghargai kebebasan individu, persamaan gender, toleransi, penggunaan kekerasan, dan lain lain.

Tuduhan tersebut tidak selamanya benar menurut Dewi Fortuna Anwar bahwa Islam bisa berdampingan dengan demokrasi dan modernisasi. Pernyataan ini terutama dapat diamati dari kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berupaya untuk

memperkenalkan identitas Indonesia di forum internasional bahwa demokrasi, Islam dan modernisasi dapat berjalan beriringan di Indonesia seperti yang dikatakannya: *“The relations between Islam and Democracy in Indonesia and their implications to their country’s foreign policy have attracted considerable attention in recent years. In the early years of his first presidential term, Susilo Bambang Yudoyono introduced his concept of Indonesia’s international identity, that is as a country in which Islam, democracy, and modernity go hand in hand”* (Anwar 2010: p 37).

Dalam perjalanan selanjutnya, Islam dan demokrasi telah mempermudah pergaulan Indonesia di forum internasional. Dengan Identitas Islam, Indonesia dekat dengan Dunia Islam dengan terus bergabung dengan OKI (Organisasi Konferensi Islam) dan D-8 (Develop – 8) tanpa harus menjauh dari pergaulan komunitas internasional lain khususnya regional ASEAN (Association for Southeast Asia Nations, dan APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), dan tentu saja PBB (Perserikatan Bangsa Bangsa). Dengan identitas demokrasi, Indonesia terpilih menjadi anggota G-20 sebagai satu satunya negara ASEAN yang tergabung dengan organisasi yang sebagian besar terdiri dari negara maju, Indonesia juga terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2006/2007 dan 2018/2019.

Hubungan internasional yang telah mapan dan strategi Indonesia dalam diplomasi global juga sudah mapan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif, Pancasila, dan mengikuti semua kesepakatan internasional yang telah ditetapkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Indonesia tidak memiliki persoalan yang berarti. Akan tetapi munculnya Fenomena virus sebagai masalah kesehatan terus berkembang menjadi masalah ekonomi, sosial, budaya dan politik termasuk politik internasional, menyebabkan Indonesia harus memiliki strategi penyesuaian. Dalam hubungan antar negara atau hubungan internasional. Virus Corona telah merubah tatanan dunia dan pola hubungan internasional.

Sejak berakhirnya Perang Dunia II, dunia diwarnai dengan persaingan antara dua *Super Power* yang membagi dunia secara vertikal antara Blok Barat yang berideologi Kapitalisme dengan Blok Timur yang berideologi Sosialisme/Komunisme. Pola hubungan internasional diwarnai dengan persaingan dua Blok ini yang masing masing diwakili oleh Amerika Serikat Bersama sekutu-sekutunya dan Uni Soviet/China bersama sekutunya. Dunia diwarnai persaingan dua ideologi yang kemudian membentuk bipolar yang secara teori sangat rentan terjadinya konflik sehingga sulit terwujudnya perdamaian internasional.

Organisasi internasional yang terbentuk dalam situasi internasional penuh persaingan dua Kutub tersebut ialah organisasi supranasional Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang anggota hampir semua negara yang berdaulat di dunia. Disamping itu, ada organisasi

regional yang sifatnya sangat ideologis dimulai dari organisasi pertahanan NATO (North Atlantic Treaty Organization), kemudian Pakta Warsawa, Pakta Bagdad, dan CENTO (Central Treaty Organization). Organisasi pertahanan kemudian diikuti oleh Organisasi ekonomi GATT (General Agreement on Tariff and Trade) yang kemudian berkembang menjadi di WTO (World Trade Organization).

Persaingan dua kutub yang diikuti oleh munculnya organisasi pertahanan keamanan berdampak pada dunia yang tidak stabil secara politik dan pertahanan keamanan. Meskipun Perang Dunia telah berakhir dengan dibomnya dua kota Jepang Hiroshima dan Nagasaki di bulan Agustus 1945, tetapi perang sebenarnya belum berakhir. Perang hampir ada di semua sudut dunia dari Perang Korea 1950 – 1953, perang Vietnam 1967 -1971, Perang Arab – Israel 1948-sekarang, Perang antar etnis di beberapa Afrika seperti Sudan, Nigeria, dan Afrika Selatan. Amerika Serikat dan Uni Soviet kemudian berinisiatif membentuk tatanan dunia baru untuk mencegah perang melalui diplomasi dalam perjanjian-perjanjian seperti Perjanjian Teheran dan Yalta yang kemudian menghasilkan Organisasi Internasional Perserikatan Bangsa Bangsa yang mempunyai tujuan yang luas dan beranggotakan negara-negara dari seluruh dunia, juga organisasi-organisasi yang bertujuan khusus seperti NATO dan Pakta Warsawa. Akibat dari initiative dua negara yang terlibat perang Dunia, secara geografis seperti terbagi menjadi dua bagian Barat dan Timur, dan secara ideologis menjadi Kapitalisme dan Sosialisme. Kecenderungan Tata Internasional Baru dapat dibentuk dengan upaya dan dibiarkan secara alamiah terjadi.

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

1. Tata Dunia Baru di Masa Pandemi: Tidak Ada Konflik dan Kerjasama Baru

Dalam teori Realisme perang merupakan perwujudan dari persaingan untuk mendapatkan kekuasaan sehingga konflik merupakan suatu kewajaran. Di lain pihak teori idealisme/liberalisme berpandangan bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang dapat diajak bekerjasama demikian juga negara, sehingga perang selalu diikuti oleh perdamaian dan Kerjasama. Dalam kenyataannya Perang Dunia I diikuti dengan terbentuknya Liga Bangsa Bangsa (LBB) dan Perang Dunia II diikuti oleh terbentuknya Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Kedua Perang ini merupakan perang fisik yang lebih memperebutkan wilayah kekuasaan. Ketika Perang fisik berakhir diikuti dengan perang ideologi yang dikenal sebagai Perang Dingin antara Blok Barat yang berideologi Kapitalis dan Blok Timur yang berideologi Sosialis.

Organisasi yang terbentuk pada masa Perang Dingin adalah organisasi yang bersifat Pertahanan Keamanan seperti NATO (North Atlantic Treaty Organization) yang merupakan organisasi pertahanan dari Blok Barat yang beranggotakan Amerika Serikat dan beberapa sekutunya di Eropa. NATO mendapat response dengan terbentuk Pakta Warsawa dari Blok Timur yang berideologi Sosialis/ Komunis. Kedua organisasi yang berazaskan ideologi ini mewarnai tata dunia yang penuh dengan perlombaan pengaruh kedua ideologi tersebut dimana. Keadaan seperti ini sebenarnya juga digambarkan sebagai keadaan yang tidak ada perang dan damai yang nyata, semua konflik sebenarnya iomajiner bukan realitas konflik fisik seperti Perang Dunia I dan II. Perang Dingin dianggap berakhir Ketika Tembok Berlin runtuh pada tahun 1989, dan Uni Soviet sebagai lambing kekuatan Blok Sosialis runtuh pada tahun 1991 dan berganti menjadi Rusia setelah beberapa negara bagian menyatakan kemerdekaan, diikuti beberapa negara Komunis di Eropa Timur memisahkan diri dari pengaruh Uni Soviet atau terlepas dari bayang-bayang pengaruhnya dan menjadi negara yang merdeka dan berdaulat.

Apakah dengan berakhirnya Perang Dingin sudah tidak ada lagi konflik di muka bumi ini? Justru sebaliknya konflik masih terjadi dan kembali ke perang fisik yang menggunakan senjata bahkan senjata biologi. Amerika Serikat muncul sebagai *Super Power* tunggal yang mendominasi keterlibatan dalam beberapa perang khususnya di Timur Tengah. Organisasi yang muncul pada masa ini yaitu organisasi regional yang bertujuan ekonomi. Beberapa organisasi regional ialah Uni Eropa, APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), NAFTA (North America Free Trade Area), LAFTA (Latin America Free Trade Area), dan lain lain. Kecenderungan ini disertai dengan era yang dikenal sebagai globalisasi yaitu situasi yang menggambarkan adanya fenomena permasalahan yang menjadi masalah global seperti regionalism, masalah pangan, senjata, terorisme, perkembangan teknologi informasi, dan masalah kependudukan

Dalam teori Konstruktivisme kita bisa juga mengkonstruksikan Bahasa yang menjadi alat dalam berdiplomasi antar negara. Pasca Perang Dunia II selalu dikenalkan istilah istilah diplomasi yang mendorong terwujudnya perdamaian dengan memperkenalkan istilah kedaulatan, penghormatan terhadap hak asasi manusia, *the right of self determination*, *non-intervention*, *democracy*, etc. Pasca Perang Dingin, bahasa yang paling sering digunakan adalah globalisasi, liberalisasi, demokratisasi, terorisme. Kata yang terakhir paling sering digunakan terutama karena banyak kepentingan Barat terganggu karena aktivitas terorisme ini.

Bahasa konflik atau perdamaian antar bangsa tiba tiba berhenti keetika Dunia dilanda wabah pademi COVID-19 atau yang dikenal sebagai virus Corona. Tiba-tiba bahasa yang digunakan dalam pergaulan antar bangsa yaitu, *mask, face shield, hand sanitizer, lockdown, pandemic, social distancing* ,Wuhan, Virus China, *economic implications, no political, conflict, and peace* term. Negara-negara di dunia ini seperti mementingkan urusannya sendiri tidak memperdulikan lagi negara lain. Dunia memasuki keadaan yang tidak ada perang dan damai. Organisasi Internasional yang banyak berperan dalam pergaulan antar negara yaitu WHO (World Health Organization).

Indonesia menunjukkan itikad baik dalam merepon pandemi COVID-19 dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Presiden. Presiden Jokowi mengeluarkan 9 produk hukum terkait penanganan Pandemi COVID-19 yaitu; 4 Keputusan Presiden (Keppres), 2 Peraturan Presiden (Perpres), 1 Peraturan Pemerintah (PP), 1 Instruksi Presiden (Inpres), 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang/Perpppu) (Widaningrum dan Masudi, 2020: hal 46). Peraturan ini merupakan perangkat hukum untuk menenadalikan penyebaran virus dengan tidak mempertimbangkan solidaritas Islam negara lain mengingat dalam keadaan darurat membutuhkan penangannan cepat.

2. Indonesia Membangun Identitas Nasional di Tengah Pandemi

Jika identitas pada tingkat politik internasional digambarkan mengenai ideologi (Kapitalis vs Sosialis), ekonomi (Negara Maju dan Berkembang), geografi (Utara dan Selatan) muncul setelah Perang Dunia, maka identitas agama dalam hubungan internasional baru muncul di tahun 1990-an bersamaan dengan fenomena pendekatan teori “konstruktivisme” (Vucetic, 2019). Selanjutnya, Teori konstruktivisme menjadi pendekatan ilmu hubungan internasional yang populer. Pendekatan ini berbeda dari teori Realisme yang meyakini bahwa hubungan antar bangsa dibentuk oleh kebutuhan untuk memenuhi kepentingan semata, konstruktivis melihat pola interaksi yang dibentuk oleh unsur lain seperti norma, identitas, intensi, dan Bahasa yang menjadi bagian penting dari proses historis hubungan antar subyek (Hadiwinata, 2017: 260).

Identitas secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang membedakan dari yang lain. Sementara itu Alexander Wendt mendefinisikan identity sebagai “ *a characteristic in a purposeful actor which creates behavioral and emotional intends , so identity is rooted in actor’s self-conception, but the implication of this conception depends on whether other actors accept and actor in the same way* “ (Syahbahrami,2016: 2439), Sebagai pendekatan dalam memahami fenomena hubungan internasional, pendekatan identitas merupakan upaya

konstruktivis untuk memahami bagaimana identitas mengarahkan pemikiran dan tindakan dalam hubungan internasional, dan bagaimana politik internasional membangun identitas negara (Vucatic,2019).

Oleh karena dalam berhubungan dengan negara lain setiap negara mempunyai politik luar negeri maka dalam politik luar negeri identitas berfungsi sebagai pijakan atau kerangka berpikir dalam berhubungan dengan negara lain. Bagian ini akan menjelaskan politik luar negeri Indonesia terhadap Dunia Islam khususnya terhadap fenomena yang terjadi di Timur Tengah, Sebagai negara yang beridentitas Islam, Indonesia selalu peduli terhadap peristiwa politik khususnya konflik internal maupun regional Timur Tengah.

Jarak Indonesia dengan Timur Tengah sebenarnya tidak dekat karena paling cepat 10 Jam penerbangan untuk mencapai negara terdekat seperti Uni Emirat Arab. Dari segi bahasa dan budaya Indonesia dengan Timur Tengah juga tidak mempunyai kesamaan. Satu faktor yang mendekatkan semua jarak tersebut yaitu faktor agama, Islam. Indonesia dengan penduduk mayoritas 85 % beragama Islam membuat negara ini mempunyai kedekatan *ukhuwah* dengan negara-negara Timur Tengah yang mayoritas atau 95 % penduduknya beragama Islam sekaligus tempat lahirnya agama ini. Kedekatan ini mendorong Indonesia ingin mengambil peranan dalam penyelesaian konflik atau masalah yang dihadapi negara-negara Timur Tengah. Ada beberapa masalah mutakhir yang saat ini dihadapi oleh negara-negara Timur Tengah akibat dari pergolakan *The Arab Spring* yaitu negara-negara mengalami proses demokrasi yang memakan korban jiwa dan kerugian material yang sangat signifikan tetapi belum menunjukkan stabilitas politik hingga saat ini. Terdapat minimal 5 pergolakan politik di Timur Tengah yang menjadi perhatian Indonesia; Pertama, yaitu pergolakan Suriah ; Kedua, ancaman ketidak stabilan politik Mesir dan Libya. Ketiga, konflik Yaman – Saudi Arabia. Ke-empat, konflik internal Palestina serta Palestina- Israel, Ke-lima, pengembangan nuklir Iran.

Timur Tengah merupakan wilayah yang jauh dari Indonesia, dan kejadian di Timur Tengah juga terjadi di wilayah lain misalnya Afrika dan Amerika Latin. Akan tetapi karena kedekatan persamaan agama menyebabkan Indonesia sangat peduli dengan apa yang terjadi di Timur Tengah. Fenomena *the Arab Spring* atau Musim Semi Arab yang seharusnya membawa perbaikan tatanan ekonomi, dan stabilitas politik karena angin demokrasi yang menjanjikan perbaikan cara berkuasa, ternyata tidak membawa perbaikan justru sebaliknya membawa bencana yang lebih parah dari sebelumnya.

Sikap Indonesia selama ini dalam menghadapi fenomena Musim Semi Arab ini terlihat lebih banyak menunggu dan berhati hati. Hal ini bisa dipahami karena Indonesia mempunyai

hubungan baik dengan negara yang mengalaminya. Mesir misalnya merupakan negara Arab yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1946. Selanjutnya hubungan baik Mesir – Indonesia terjaga sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Indonesia mempunyai keterikatan dengan Mesir sebagai sesama negara pendiri Gerakan NonBlok, dan anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam), dan Kelompok D-8 (Development Eight) bersama dengan Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, dan Nigeria.

Uraian di atas menunjukkan bahwa selama ini politik luar negeri Indonesia cenderung menunjukkan kedekatan dengan Dunia Islam. Akan tetapi ketika menjelang COVID-19 berakhir di bulan Agustus 2021, jamaah Umroh dan Haji Indonesia tidak dapat memasuki tanah suci untuk menjalankan ibadah karena vaksin Sinovac China tidak diterima oleh pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi hanya menerima vaksin Pfizer, BioNtech, Oxford Astra Zeneca, Moderna, Johnson & Johnson'Jassen. Persyaratan ini masih ditambah dengan 5 hari isolasi dan test PCR di Saudi. Tidak ada alasan yang pasti penolakan terhadap vaksin Sinovac tetapi bisa diasumsikan karena Saudi dekat dengan produsen vaksin yaitu Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, sementara saat ini tengah terjadi perang dagang Amerika VS China. Saudi menunjukkan solidaritasnya pada kawan baiknya dan mengabaikan solidaritas keagamaan. Masalah kesehatan ini telah menjadi urusan politik.

Menurut Saudi Press Agency pada 9 Oktober 2021 Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Lestari P Marsudi dan Menteri Agama H Yaqut Cholil Qoumas saat itu melakukan diplomasi negosiasi dengan Menteri Kesehatan Saudi. Pada akhirnya pemerintah Indonesia diizinkan mengirimkan jamaah Haji dan Umroh di tahun 2022 dibuktikan dengan terbitnya Surat izin (tasrih) dari Kementerian Kesehatan Arab Saudi pada Kantor Kesehatan Haji Indonesia di Makkah pada 2 Juli 2022 untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada Jamaah. Dari pihak Indonesia para Jamaah yang akan ke Saudi harus sudah divaksin seperti yang disyaratkan sehingga pemakaian vaksin COVID-19 tidak hanya berasal dari China. Dengan dikeluarkannya ijin dari pemerintah Saudi untuk jamaah Umroh dan Haji Indonesia, menunjukkan bahwa diplomasi berjalan lancar dan kesekatang untuk saling memberi dan menerima sesuai dengan teori Diplomasi. Pemerintah Saudi sebagai pemangku 2 kota suci umat Islam nampak tidak ingin memperpanjang perdebatan, Dari sisi Indonesia, jamaah Haji maupun Umroh selama ini menunjukkan perilaku yang baik.

Dukungan Indonesia terhadap nasib bangsa Palestina sangat berkaitan dengan sikap negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia. Beberapa saat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, pengakuan internasional tidak secara otomatis diperoleh. Indonesia

harus melalui beberapa perundingan dengan Belanda sampai pada akhirnya kedaulatan Indonesia secara Internasional diakui pada 27 Desember 1949. Negara Arab yang pertama kali mengakui kedaulatan Indonesia tersebut adalah Mesir diikuti oleh Suriah, Yordania, Irak, dan Lebanon, kemudian dilanjutkan oleh pengakuan Liga Arab.

Dukungan Negara-negara Arab atas kemerdekaan Indonesia sangat mungkin didorong oleh solidaritas sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam. Sebagaimana besar Negara Arab menempatkan faktor Islam sebagai faktor penting dalam kebijakan politik luar negeri mereka baik sebagai faktor motivator, legitimator, maupun justifikator (Dawisha, p 5) Meskipun demikian, peranan Islam dalam hubungan negara-negara Arab dengan Indonesia lebih didorong hanya sebagai motivator sebagai sesama negara yang mempunyai penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Indonesia maupun negara Arab seperti Mesir dan Suriah pada waktu itu orientasi politik luar negerinya cenderung ke Sosialis dan dekat dengan Negara –negara Komunis seperti Uni Soviet, Cina, maupun Korea Utara.

Selanjutnya pada masa Orde Baru, Islam kurang mendapatkan tempat atau posisi di lapangan politik. Sehubungan dengan sikap pemerintah tersebut, hubungan dengan Negara-negara Arab terasa tidak intensif. Pemerintahan di awal Orde Baru yang para Mentrinya sebagian besar intelektual kemungkinan besar khawatir bahwa kedekatan Indonesia dengan negara-negara Arab dapat membangkitkan potensi oposisi kelompok Islam di dalam negeri yang nampaknya dianggap mempunyai kemungkinan untuk membahayakan kekuasaan.

Hal yang perlu harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Indonesia ialah massa Islam yang mempunyai logika yang berbeda dengan perhitungan-perhitungan politis ekonomis para pembuat kebijakan. Kesalahan mengabaikan faktor Islam telah menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari negara-negara Arab ketika masalah Timor Timur dibicarakan dalam agenda Majelis Umum PBB pada tahun 1986.

Sampai menjelang tahun 1990-an, Indonesia lebih suka menjaga jarak dengan negara-negara Arab, karena negara-negara Arab dikhawatirkan akan mempengaruhi kelompok Islam di dalam negeri. Menurut istilah Michael Leifter bahwa faktor Islam dalam pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia dianggap lebih sebagai tantangan dan bukan dukungan. Tepatnya dikatakan: *” Islam has entered the foreign policy process more by way of challenge than by way of support.” (Leifter, 1983: 158)*

Sikap menjaga jarak terhadap Negara-negara Arab dan kurang memberi tempat pada kelompok Islam kemudian berubah dengan diijinkannya pembukaan Markas Besar PLO di

Jakarta dengan Duta Besar I yaitu HE Ribbi Awwad yang sempat tertunda beberapa tahun. Perubahan ini sangat dipengaruhi oleh perubahan situasi internasional yaitu dengan berakhirnya Perang Dingin yang menyebabkan runtuhnya Tembok Berlin, Negara Adidaya Uni Soviet, Negara-negara Eropa Timur khususnya kasus Bosnia-Hezergovina, Perang Teluk, perubahan situasi konflik Arab – Israel dengan upaya perundingan Madrid pada tahun 1991, dan perundingan Oslo 1993.

Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina masih konsisten hingga Presiden Joko Widodo . Komitmen tersebut dapat dideteksi ketika Presiden Jokowi menerima permintaan Maroko dan OKI agar Indonesia menjadi penyelenggara KTT OKI Luar Biasa di tahun 2016. Alasan penerimaan Indonesia menjadi tuan rumah KTT OKI yang akan diselenggarakan pada 6 – 7 Maret 2016 karena Indonesia ingin berperan sebagai penengah konflik internal Palestina antara Hamas dengan Fatah agar Negara Palestina merdeka cepat terwujud. Apakah Indonesia dapat menjadi penengah yang baik dalam konflik ini, adalah pertanyaan yang jawabannya ditunggu oleh masyarakat internasional.

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dahulu disebut Organisasi Konferensi Islam adalah organisasi internasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Islam atau Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Latar belakang berdirinya OKI ialah munculnya solidaritas Islam ketika Masjidil Aqsa di Jerusalem dibakar oleh seorang Yahudi pada 21 Agustus 1969. Pada 22-25 September 1969 beberapa Negara Islam bertemu di Rabat, Maroko sepakat mewujudkan solidaritas Islam dalam organisasi. Indonesia sejak awal menunjukkan dukungan terhadap OKI dengan menghadiri Konferensi OKI di Jeddah pada tahun 1972. Akan tetapi Indonesia menolak untuk menandatangani Deklarasi OKI yang menyebutkan anggota OKI adalah Negara Islam. Indonesia pada akhirnya bersedia menandatangani Deklarasi OKI menjelang kejatuhan Presiden Soeharto di tahun 1998.

Dalam masalah pembangunan nuklir Iran, Indonesia senantiasa mendukung Iran jika pembangunan nuklir ditujukan untuk kemanusiaan seperti untuk kedokteran, dan listrik. Iran adalah negara Islam dengan mayoritas Syiah berbeda dari Indonesia yang bermahzab Sunni. Tetapi solidaritas Islam ternyata mampu menghilangkan perbedaan tersebut yang di Timur Tengah bias menjadi sumber konflik.

3. Identitas Sebagai negara yang Demokratis: Dapatkah Dipertahankan?

Demokrasi secara mudah artinya pemerintahan oleh rakyat karena berasal dari kata Demos (Rakyat) dan Kratos (pemerintahan) dengan demikian pemerintahan dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat yang diwakilkan melalui parlemen. Ciri utama pemerintahan

yang demokratis ialah bahwa kekuasaan dibagi bagi, dibatasi dan diawasi. Sistem demokrasi di dunia mengalami pasang surut, pada tahun 1988 -2005 negara-negara non demokratis di dunia menurun dari 37 % menjadi hanya 23 %, dan negara-negara bebas naik dari 36 % menjadi 46 % dari seluruh negara di dunia (Cipto, 2019). Demokrasi merupakan pilihan cara pengelolaan negara yang dianggap terbaik.

Indonesia sejak kemerdekaan telah memutuskan untuk memilih Demokrasi Presidensiil pada system pemerintahannya. Kekuasaan dibagi bagi sesuai dengan prinsip Trias Politica dari Montesque; Eksekutif sebagai pelaksana Undang Undang, Legislatif untuk pembuat Undang Undang, dan Yudikatif sebagai pengawas Undang Undang. Sistem yang dipilih oleh Indonesia ialah Demokrasi Presidensiil. Ciri dari demokrasi Presidensiil ialah bahwa Presiden sebagai Kepala Negara dan Pemerintahan tidak dapat dijatuhkan oleh Parlemen, dan sebaliknya parlemen tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. (Cipto,2019: 4). Akan tetapi Presiden mempunyai Hak istimewa mengeluarkan Dekrit untuk mengaulir keputusan keputusan Parlemen, serta mempunyai hak prerogative untuk memilih pembantu pembantunya. Sementara Parlemen mempunyai hak “*impeachment*” atau mosi tidak percaya jika Presiden mulai tidak dipercaya oleh masyarakat yang ditandai dengan adanya demonstrasi atau protes.

Setelah Presiden Soeharto jatuh pada tahun 1998, pengamat ttg Indonesia pada umumnya mengatakan bahwa Indonesia memasuki era “Demokrasi” yang ditandai dengan diperbolehkannya referendum mengenai Timor Timur di tahun 1999, dan diperkenalkan kebebasan pers yang difasilitasi oleh Presiden BJ Habibie. Presiden Habibie juga menyelenggarakan Pemilihan Umum dan kemudian Presiden Abdurrahman Wachid terpilih menjadi Presiden. Dibawah Presiden Gus Dur suasana demokrasi terasa khususnya ketika etnik minoritas Tionghoa diberi kebebasan mengekspresikan budayanya, dan agama Konghucu diakui sebagai agama resmi. Keadaan ini dilanjutkan dibawah Presiden Megawati, khususnya dalam menyelesaikan masalah disintegrasasi Megawati mengutamakan dialog.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggantikan Megawati untuk masa 2 periode. Presdiden SBY meninggalkan warisan identitas internasional Indonesia sebagai kesatuan demokrasi, Islam dan modernitas (Anwar,2010: p50). SBY ingin menunjukkan pada dunia bahwa Islam dan demokrasi serta modernisasi bisa berjalan beriringan. Upaya ini telah meningkatkan performa Indonesia di dunia internasional; hubungan Indonesia dengan negara-negara Islam membaik dibanding pada masa President Soeharto. Di sisi lain hubungan dengan negara-negara Barat (negara maju) juga berjalan lancar. Di bawah SBY,

Indonesia bisa menjadi anggota aktif G-20 bersama 18 negara anggota lain gabungan negara maju dan berkembang ditambah Uni Eropa.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggantikan SBY di tahun 2014 dengan melanjutkan beberapa kebijakan luar dan dalam negeri. Semula tidak menunjukkan adanya perubahan yang signifikan atas kebijakan-kebijakannya selain memperkenalkan Poros Maritim sebagai kebijakan baru yang mungkin bisa untuk mengatasi persoalan persoalan ketinggalan ekonomi. Akan tetapi dalam perjalanan waktu orientasi politik luar negeri Indonesia terlalu menuju ke Timur khususnya dengan Tiongkok.

Implementasi demokrasi di akhir masa jabatan Presiden Jokowi I nampak kedodoran khususnya jika diperhatikan dalam proses Pemilihan Umum. Presiden Jokowi gagal merampingkan jumlah Partai Politik, dan terjadi kecurigaan kecurangan dalam proses penghitungan suara, banyak petugas pemilu KPPS (Komisi Panitia Pemungutan Suara) yang meninggal usai pemilu, penghitungan suara yang kurang terbuka, dan pemilu yang diumumkan pada malam hari.

Setelah itu, demonstrasi mahasiswa secara terus menerus dan merebak di beberapa kota pada antara 23 – 25 September 2019. Cara negara memperlakukan para demonstran yaitu dengan kekerasan. Keresahan publik semakin meningkat ketika dua wartawan yaitu Dandy Laksono dan Ananda Badudu ditangkap (Kompas, 29 September 2019: 2). Mahasiswa menuntut revisi UU tentang KPK yang akan melemahkan Lembaga ini, pemilihan pimpinan KPK yang baru, dan menolak pendekatan militeristik terhadap pergola Papua. Suasana ini digambarkan oleh Anita Wakhid, putri Presiden Gusdur di depan masyarakat sipil Queensland University of Technology, Brisbane, Australia pada 26 September lalu sebagai berikut: *“Selama 21 tahun kami telah menikmati demokrasi, kebebasan berekspresi, dan nilai-nilai Hak Asasi Manusia. Tetapi tak ada jaminan bahwa itu akan berlangsung selamanya”* (Kompas, 20 September 2019: 2).

Suasana yang tidak demokratis akhir akhir ini tentu saja akan mempengaruhi performa Indonesia di forum internasional karena Media Internasional seperti Al Jazeera, BBC Inggris, dan Welle Jerman memberitakannya. Reaksi sementara dari beberapa negara telah memperingatkan warga negaranya agar hati hati untuk datang ke Indonesia. Dalam teori legitimasi demonstrasi yang terus menerus menunjukkan adanya persoalan legitimasi politik penguasanya yang disebabkan salah satunya yaitu soal penerapan demokrasi. Tanpa legitimasi atau kepercayaan dari masyarakat sangat sulit bagi penguasa dalam menjalankan kekuasaan termasuk dalam berhubungan dengan negara lain (Hudson, 1977: 4).

Di tengah ketidakpastian di dalam negeri, Presiden Jokowi memanfaatkan momentum Pandemi untuk tetap melaksanakan Pemilu Kepala Daerah atau Pilkada pada 9 Desember 2020. Pilkada ini untuk memilih 224 Bupati, 37 Walikota, dan 9 Gubernur untuk memimpin provinsi. Meskipun banyak yang keberatan atas Pilkada di tengah Pandemi karena sebaiknya dana lebih difokuskan untuk penanganan COVID-19, tetapi Pilkada tetap berjalan dengan hasil putra Presiden menjadi Walikota Solo, dan menantu Presiden menjadi Walikota Medan dengan partisipasi di beberapa kota besar di bawah 50 %. Dengan demikian bagi orang tertentu pandemi ini bisa menguntungkan.

C. Kesimpulan

Sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pola politik internasional mengalami perubahan dari pola yang kental dengan kerjasama atau konflik menjadi rendah kerjasama dan konflik. Negara cenderung lebih individualistik dalam menangani pandemi. Bagi negara yang tidak dapat memproduksi vaksin ketergantungan pada negara produsen vaksin semakin tinggi dan hutang juga semakin meningkat. Kemudahan negara dalam memperoleh vaksin sangat bergantung pada hubungan baik dengan negara produsen vaksin. Indonesia sejak Presiden Jokowi sesi pertama telah dekat dengan China dalam rangka membangun Poros Maritim atau Maritim Axis, sehingga ketika Indonesia membutuhkan vaksin dari negri tirai bambu ini, Indonesia sama sekali tidak mengalami kesulitan.

Sementara itu, identitas Islam dan demokrasi telah banyak meningkatkan performa Indonesia dalam hubungan internasional. Indonesia dapat dengan mudah berhubungan dengan negara-negara Islam untuk kepentingannya misalnya ekspor-impor minyak ataupun pengiriman tenaga kerja, maupun aktif turut serta menyelesaikan konflik-konflik diantara mereka misalnya menjadi mediator.

Pembenahan pelaksanaan demokrasi akan sangat berguna bagi hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional. Identitas Indonesia sebagai negara paling demokratis nomor tiga di dunia harus dipertahankan untuk mempermudah hubungan Indonesia dengan masyarakat internasional. Hal yang harus diperhataikan bahwa Ketua DPR dan Presiden berasal dari satu partai yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Sangat sulit mengharapkan ada “check and balances” dalam situasi seperti ini. Suasana yang tidak demokratis sangat memungkinkan adanya ketidakpercayaan masyarakat international. Indonesia tetap dapat mempertahankan dua identitas ini yaitu Islam dan Demokrasi untuk kelangsungan existensinya di forum internasional di masa pandemi atau pascapandemi.

Daftar Pustaka

- Abra, EH, 2020, *Rekonstruksi Asas Partai Politik di Indonesia*, Penerbit Thafa Media, Yogyakarta.
- Anwar, DF, *Foreign Policy, Islam and Democracy in Indonesia*, Journal of Indonesian Social Sciences and Humanities, Vo;.3,2010, p 37 – 54
- Cipto, B,2019, *Ambruknya Kredibilitas Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019
- Choi,N, Local Elections in Post-Reformasi Indonesia: A View from Yogyakarta, Contemporary Southeast Asia, August 2004, Vol.26 ,No 2, pp280 -301, Published by ISEAS, Singapore
- Hudson, C Michael, 1977, *Arab Politics The Search for Legitimacy*, Yale University.
- Aly, Bachtiar, *Interaksi Iran – Irak*, Seputar Indonesia 8 Maret 2008
- Dawisa , Adeed, *Islam in Foreign Policy*, Cambridge University Press, Cambridge, London, 1983.
- Dekker, B. (2020). *The impact of COVID-19 measures on Indonesian value chains*. Clingendael Institute. <http://www.jstor.org/stable/resrep25674>
- Djalal, Hasyim, *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasa Warsa 1990*, CSIS, Jakarta, 1997.
- Filho,WL, 2021, *Covid-19 : Paving The Way for a More Sustainable World*, Manchester Metropolitan University, Manchester.
- Harvey, B S, 2002, *The Future of Indonesia as a Unitary State: Sparatism and Decentralisation*, CNA Asia Project, <https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA594235.pdf>, accessed
- Huda, N, 2011, Ilmu Negara, Rajawali Press, Yogyakarta
- Korany, Baghdad , dan Dessouki, Hilal, *the Foreign Policy of Arab States*, Westview Press, 1984.
- Kuncahyono, Trias, Jalur Gaza: Tanah Terjanji, Intifada, dan Pembersihan Etnis, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2009
- Leifer, Michel, *Indonesia's Foreign Policy*, the Royal Institute of International Affairs, London, 1993.
- Mas'udi, W, dan Winanti,P, 2020, Tata Kelola Penanganan COVID-1, di Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Mietzner, M. (2021). INDONESIA IN 2020: COVID-19 and Jokowi's Neo-liberal Turn. *Southeast Asian Affairs*, 107–121. <https://www.jstor.org/stable/27075078>
- Osman , T, *Egypt on the Brink From Nasser to Mubarak*, Yale University Press Yale, 2010.
- Perwita,AGB, *Indonesia and The Muslim World : Islam and Secularism in the Foreign Policy of Soeharto and Beyond*. Malaysia, NIAS Publisher, 2007

- Sihbudi, Riza, *Indonesia, Timur Tengah, Masalah dan Prospek*, Gema Insani Press, Jakarta, 2010
- Sukartiko, Rachmat (editor), *Dinamika Diplomasi Indonesia Dalam Praktik*, Megapoin, Bekasi, 2003.
- Syahbahrami, D, *Identity and Power in International Relationship*, International Journal of Humanities and Cultural Studies, May, 2016
- Vucetic, S, *Identity and Foreign Policy*, Oxford Bibliographers, 10/082019
- Zuhro, S, *Pilkada Untuk Penguatan Demokrasi Daerah dan Pemda Yang Efektif*, Diskusi KAHMI, 13 Februari
- Laporan Sekretariat KPU Jawa Barat, Dini Lestari dan Indah Tavana Muttaqin, 2020, *Peningkatan Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Barat*
- Weekly Operational Update on COVID-19 Author(s): World Health Organization World Health Organization (2021) Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/resrep33241>
Accessed: 15-10-2022 14:40 UTC
- World Health Organization. (2022). *Annexes to the recommendations for use of the Sinovac-CoronaVac vaccine against COVID-19*. World Health Organization. <http://www.jstor.org/stable/resrep41090>
- Climate Strategies. (2021). *Incorporating Just Transition strategies in developing country NDCs and post COVID responses: Indonesia*. Climate Strategies. <http://www.jstor.org/stable/resrep35553>
- Yazid, E. K., & Aswicahyono, H. (2021). *SEEK AND YE SHALL FIND: EKSPLORASI HUBUNGAN KASUS COVID-19 DAN TREN PENCARIAN GOOGLE DI INDONESIA* (P. J. Vermonte & B. Krisetya, Eds.). Centre for Strategic and International Studies. <http://www.jstor.org/stable/resrep42016>
- Institute for Policy Analysis of Conflict. (2020). *JOINING FORCES WITH CORONA. In COVID-19 AND THE MUJAHIDIN OF EASTERN INDONESIA (MIT)* (pp. 5–6). Institute for Policy Analysis of Conflict. <http://www.jstor.org/stable/resrep25412.6>